



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AZIS ANDRIANSYAH**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO**
3. NHK : **792272**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 337 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/45 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 3.869 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 782 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/400 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 415.000.000**



1. MOTOR, VESPA SUPER 150CC Tahun 1962, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BG6A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.754.671
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	4.420.754.671
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.420.754.671

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.